

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Rusdi. Robyn Pilcher, dan Brian Perrin. 2010. *Performance Measurement in Indonesia: The Case of Local Government*.
- Akbar, Rusdi. 2012. *Institutional Isomorphism dalam Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik di Indonesia*. Ebnews Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Edisi 13 November 2012.
- Cooper, Donald R, and Schindler, Pamela S. 2006. *Metode Riset Bisnis*. edisi sembilan.jilid dua. jakarta, PT Media Global Edukasi
- Gaspersz, Vincent, *Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard dengan Six Sigma Untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah*, Gramedia, Jakarta, 2003
- Hartono, Jogyanto. 2010. *Analisis & Disain*. Andi, Yogyakarta.
- Indianto, Nur. dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta, BPFE.hal147.
- JB Gharthey, Crisis, *Accountability and Development in the Third World*, London, 1987.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, *Modul Pelatihan Penyusunan Kinerja*, 2005
- Lembaga Administrasi Negara RI, *Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, 2003.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Cetakan ketiga, 2001.
- LV Carino, Accountability, Corruption and Democracy: *A Clarification of Concepts*, (in the Asian Review of Public Administration, Vol. III. No. 2, December 1991)
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Marzuki. 2006. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta:BPFE UII
- Miles, M.B., dan A.M. Huberman. 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press Jakarta
- Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muthoharoh, Ika. 2009. *Peran Pajak Parkir dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Jurnal pascasarjana UIN, Malang.
- Pusdiklatwas, BPKP. 2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*, Edisi kelima.
- Rasul, Sjahrudin. 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara, Perum Percetakan Negara Indonesia*, Jakarta.
- Paul, Samuel. 1992. *Accountability in Public Service: Exit, Voice and Control*, (The World Development Journal, Vol.20, No.7)
- Sugiyono, 2001, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Supartini, Nunik. 2012. *Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.
- , *Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- , *Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi*
- , *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- , *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Pedoman Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri*
- , *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- , *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- , *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan*

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

-----, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*

-----, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*

-----, *Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul*

-----, *Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*